

**SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AMELIA ARNADIA  
E051 181 005**



**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

Disusun dan diajukan oleh

**AMELIA ARNADIA**

**E051 181 005**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**

NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing II




**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si**

NIP. 19790106 200501 1001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**

NIP. 19640727 199103 1001

**LEMBAR PENERIMAAN  
SKRIPSI**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**AMELIA ARNADIA**

**E051 181 005**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, Maret 2022**

Menyetujui,

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
Sekertaris : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si  
Anggota : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si  
Anggota : Dr. Indar Arifin, M.Si

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amelia Arnadia

NIM : E051181005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

**" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN  
BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI  
RIAU"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



(Amelia Arnadia)

## PRAKATA

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”**. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, yang Telah mengantar kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk Mama Nadira Abdullah dan Bapak M. Arief Rahman Hakim yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih

sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Serta adik-adik perempuan saya Halisa Arnadia dan Wafika Arnadia yang saling memberi doa dan semangat dalam melakukan pendidikan. Selanjutnya kepada Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam proses penanggulangan bencana longsor di lokasi penelitian dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya:
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya:
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin:
6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis:
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara.
8. Abba Aji, (Alm) Ma'aji, Atok dan Mak Itti yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Puangaji Nur'aini dan Puangaji Amirullah yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kak Halimah, Kak Enna, Kak Indah, Kak Ana, Fina yang selalu siap membantu selama penelitian peneliti.
11. Kak Saharuddin, S.IP, M.Si, Kak Marlina Rajab S.Ip, M.Si dan Kak

Siti Airinda Marennu S.Ip yang telah memberikan dukungan dan saran dalam proses penulisan menjadi lebih baik.

12. Indah Oktavia sekaligus sahabat kecil penulis di Riau
13. Nurhaliza sahabat penulis di Jambi
14. Andi Meuthia Adillah Syarif dan Nur Wihdah Tadjuddin sahabat penulis di Makassar
15. Richal Andry Triadi dan Ismail Mahendra Salim sahabat penulis di Makassar
16. Bang Randa Pratama yang telah memberi semangat dan saran kepada penulis selama menyusun penulisan.
17. Saudara tak sedarah saya di Riau: Amel, Uma, Lusi, Riza, Farida, Hera, Dandy, Regel, Ayu, Ari, Ipa, Ita, Ririn, Inur, Indah, Erika, Mina, A'af, Saddam, Hamzah dan Iqbal yang selalu memberi doa, dukungan dan selalu siap sebagai pendengar
18. Saudara tak sedarah saya di Jambi: Ijah, Tiaya, Arlin, Novi, Onyak, Dina, Rika, Lamlam, Teti, Bang Roy, Rena, Sintya, Rina, Nida, Lia, Novi, Ria, Ai, Dwi, Iqbal, Icam, Echa, Jihan, Nadia, Vani, Dorcek, Lalak, Ayuk Resti, Wiwid, Tata, Sari, Deby dan Meilin yang selalu memberi doa, dukungan dan selalu siap sebagai pendengar setiap cerita keluh kesah maupun cerita bahagia penulis.
19. Saudara tak sedarah saya di Makassar: Melyem, Tenri, Leni, Halimah, Mutik, Riska, Wihdah, Mia, Icha, Unik, Sekar, Kiki, Nuna, Nidu, Eka, Erika, Nini, Cindy, Silie, Sila, Fani, Devi, Enny, Mitha,



Sri, El, Carlos, Boska Rais, Lerang, Adam, Ocid, Madest, Wahyudi, Bora', Gispa dan Sulhan yang selalu memberi doa, dukungan dan selalu siap sebagai pendengar setiap cerita keluh kesah maupun cerita bahagia penulis.

20. Richal Andry Triadi terimakasih telah menjadi partner sekaligus support system penulis dalam setiap makna proses yang dilalui bersama jua untuk hal-hal baik semoga panjang umurnya.
21. Seluruh teman-teman "Eleftheria 2018"
22. Seluruh teman-teman angkatan 2018 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
23. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) sebagai rumah kedua penulis yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan.
24. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Bulukumba 1 Gelombang 106

Makassar, 15 Februari 2022

Amelia Arnadia

E051181005



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH .....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Peran Pemerintah Daerah.....	10
2.1.1 Peran .....	10
2.1.2 Pemerintah Daerah .....	11
2.1.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana	16
2.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana .....	19
2.3 Kerangka Konsep.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian .....	27
3.2 Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Sumber Data .....	33

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.1.1 Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	38
4.1.2 Kecamatan Tanah Merah.....	42
4.2 Pembahasan dan Hasil Penelitian .....	54
Gambar 3 Peta Kawasan Rawan Bencana.....	55
4.2.1 Penanggulangan Bencana Alam Desa/Kelurahan Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir .....	55
4.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Indragiri Hilir.....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
Buku/E-Book dan Jurnal.....	106
UU dan Peraturan .....	108
Website Resmi .....	108
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....	110
LAMPIRAN DATA SEKUNDER.....	116

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Dampak Bencana Tanah Longsor 3 Tahun Terakhir Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.....	4
<b>Tabel 2</b> Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanah Merah, 2021.....	43
<b>Tabel 3</b> Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tanah Merah, 2020.....	43
<b>Tabel 4</b> Nama-nama Lurah Kuala Enok.....	47
<b>Tabel 5</b> Jumlah Penduduk Kelurahan Kuala Enok.....	49
<b>Tabel 6</b> Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	53
<b>Tabel 8</b> Banyaknya Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2020.....	71
<b>Tabel 9</b> Rekap Kejadian Bencana Di Kab. Inhil Tahun 2020.....	72
<b>Tabel 10</b> Rencana Anggaran Tahun 2019 BPBD.....	76
<b>Tabel 11</b> Pengukuran Pencapaian Sasaran BPBD Kabupaten Inhil Tahun 2019.....	83

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> Peta Rawan Bencana Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.....	3
<b>Gambar 2</b> Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	41
<b>Gambar 3</b> Peta Kawasan Rawan Bencana.....	54
<b>Gambar 4</b> Sosialisasi Berbasis Masyarakat.....	59
<b>Gambar 5</b> Bangunan pondasi Di Kelurahan Kuala Enok.....	62
<b>Gambar 6</b> Bencana Longsor Yang Terjadi di Kawasan Pondasi.....	63
<b>Gambar 7</b> Ilustrasi Bangunan Pondasi di Kelurahan Kuala Enok.....	64
<b>Gambar 8</b> Peta Kawasan Rawan Bencana	77
<b>Gambar 9</b> Pemecah Gelombang Kelurahan Tagaraja.....	68
<b>Gambar 10</b> Ilustrasi Pembangunan Pemecah Gelombang.....	68
<b>Gambar 11</b> Ilustrasi Pembangunan Turap dari Beton.....	69
<b>Gambar 12</b> Jembatan Sungai Perigi Penghubung Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah Putus Akibat Longsor	79
<b>Gambar 13</b> Rekonstruksi Jembatan Sungai Perigi	80
<b>Gambar 14</b> Pembangunan Rumah Layak Huni	85

## ABSTRAK

**AMELIA ARNADIA**, Nomor Induk Mahasiswa E051181005, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Bencana alam pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh manusia karena merupakan serangkaian peristiwa yang sifatnya tidak terduga dan merugikan. Salah satunya bencana alam longsor yang terjadi di Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, dengan penekanan mulai dari pra bencana hingga ke rekonstruksi dan rehabilitasi yang merupakan bagian dari pascabencana. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok BPBD Kabupaten Inhil dalam penanggulangan bencana longsor terbagi atas tiga bidang, yaitu bidang Pencegahan Bencana, bidang Penanganan darurat dan Logistik dan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dari pelaksanaan tugas pokok ketiga bidang tersebut belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realitas fenomena bencana longsor di lokasi penelitian masih kerap terjadi tiap tahunnya. Berdasarkan baik data primer dan data sekunder ada dua alternatif untuk meminimalisir terjadi bencana longsor, yaitu pemecah gelombang dan turap beton.

**Kata Kunci: Longsor, Peran, Pemerintah Daerah**

## **ABSTRACT**

**AMELIA ARNADIA**, Student Identification Number E051181005, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. The thesis entitled "**The Role of Local Governments in Natural Disaster Management in Indragiri Hilir Regency, Riau Province**", under the guidance of Mr. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si as the Main Advisor and Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si as Advisors.

Natural disasters are basically unavoidable by humans because they are a series of events that are unpredictable and detrimental. One of them is the landslide that occurred in Kuala Enok Village and Tanah Merah Village, Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Both central and local governments are responsible for disaster management, with emphasis from pre-disaster to reconstruction and rehabilitation which are part of the post-disaster. The local government through the Natural Disaster Management Agency (BPBD) is the party that holds full responsibility in the implementation of disaster management. The purpose of this study was to determine the implementation of the main tasks of BPBD in natural disaster management in Indragiri Hilir Regency and to find out what factors influence the implementation of BPBD's main tasks in natural disaster management in Indragiri Hilir Regency. The method used is a qualitative approach with a narrative research strategy. Data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the implementation of the main tasks of BPBD Inhil Regency in landslide disaster management is divided into three fields, namely the field of Disaster Prevention, the field of Emergency Management and Logistics and the field of Rehabilitation and Reconstruction. From the implementation of the main tasks of the three fields, it has been running well but not yet optimal. This can be seen from the reality of the phenomenon of landslides in the area which still often occurs every year.

**Keywords:** Landslides, Role, Local Government.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan daerah rawan bencana. Data historis bencana menunjukkan bahwa kawasan Inhil sering mengalami bencana. Sepanjang tahun, Inhil dilanda berbagai bencana alam, mulai dari banjir bandang, banjir rob, abrasi hingga longsor. Data dari Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana terparah di Kabupaten Inhil, sedangkan dari segi geografis, Riau terletak di Pulau Sumatera, dan Pulau Sumatera terletak di lempeng Indo-Australia dan Eurasia, serta dilintasi oleh zona sesar Sumatera yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera.

Kecamatan Tanah Merah merupakan satu dari dua puluh kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil. Sebelum tahun 1907, Kecamatan ini bukanlah kawasan pemukiman. Sebelumnya hanya sebagai tempat persinggahan para suku nelayan (Laut), sesuai dengan kebiasaan mereka tinggal dan berkembang biak di sampan, kemudian berhenti sambil menunggu air surut. Sebagai tradisi panjang bangsa Indonesia ribuan tahun yang lalu, ditambah dengan lingkungan alam yang suka merantau mencari tempat baru dan tanah

subur seiring berjalannya waktu, ditemukan pemukiman yang cocok untuk para pendatang di Johor (Malaka) .Di pantai timur Sumatera, anak muara yang masuk ke Indragiri atau Sapat Dalam sungai akhirnya ditemukan.

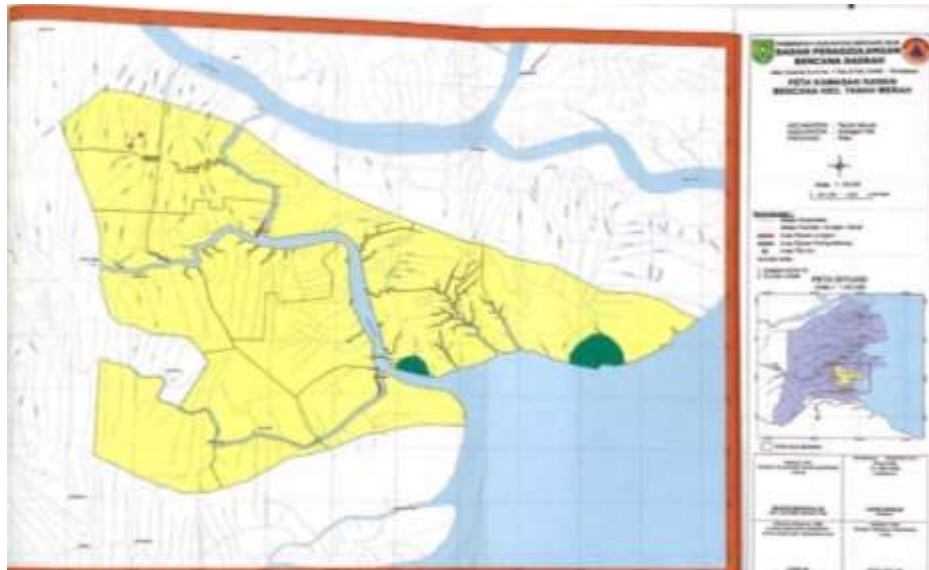
Pada tahun 1898 sekelompok pelacak atau penemu singgah di pantai dan menikahi seorang gadis di luar sungai, kemudian mereka menyusuri sungai tersebut dan akhirnya menemukan sungai pinang dengan tenaga dan peralatan yang sederhana. Kabar ditemukannya lahan pertanian di Sungai Indragiri (Sapat Dalam) tersebar luas hingga ke Johor (Malaka). Oleh karena itu, para pendatang Bugis lainnya mendirikan perkebunan sebagai lahan pertanian pada tahun 1907. Pelopornya adalah Sake, Supu, Palla, Jumpai dan Kasim.

Seiring berjalannya waktu banyak orang menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal. Pada waktu itu daerah tersebut belum ada nama, hanya untuk tempat tinggal beberapa orang yang biasa disebut "Bagan Arang". Bekas dan sisa pembakaran yang terbakar bercampur tanah lalu berubah warna menjadi merah, sehingga dinamakan Tanah Merah.

Selanjutnya, Kecamatan Tanah Merah merupakan satu diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil rawan bencana. Bencana alam yang kerap terjadi di kecamatan tersebut adalah tanah longsor. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan didapatkan informasi bahwa beberapa daerah yang diprediksi akan mengalami

longsor diantaranya adalah Kecamatan Tanah Merah, Enok, Sungai Batang, Kateman, dan Tembilahan.

**Gambar 1**  
**Peta Rawan Bencana Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau**



**Sumber Data: BPBD Kabupaten Inhil Provinsi Riau  
2020**

Pada peta kawasan rawan bencana di Kecamatan Tanah Merah diatas dua daerah yang rawan terjadinya bencana tanah longsor, yaitu Kelurahan Kuala Enok dan Desa Tanjung Baru. Dalam wawancara pendahuluan didapatkan informasi bahwa Kelurahan Kuala Enok merupakan daerah yang kerap sekali terjadi bencana tanah longsor. Bahkan tiap tahun selalu terjadi bencana tanah longsor.

**Tabel 1**  
**Dampak Bencana Tanah Longsor 3 Tahun Terakhir Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau**

Waktu Kejadian		Korban Terdampak	Kerugian Materil	Fasilitas Publik
2018	12/8	29 Jiwa	Rp. 200 Jt	- 1 Pos Kamling - Jalan Umum 25 meter
	25/11	17 Jiwa	Rp. 200 Jt	- 2 Pelabuhan
2019	2/2	21 Jiwa	Rp. 250 Jt	- Jalan beton 15 meter
	2/8	40 Jiwa	Belum ditafsir	- Jerambah Kayu 15 meter - Jerambah Beton 30 meter
2020	6/8	21 Jiwa	Belum ditafsir	-
	17/12	6 Jiwa	Rp. 30 jt	- 1 Pelabuhan - 1 Jerambah Pos Pengawasan Perikanan - 1 Gudang Ikan

**Sumber Data: Catatan Kantor Kecamatan Tanah Merah 2020**

Berdasarkan data diatas bencana tanah longsor di Kecamatan Tanah Merah terjadi secara terus menerus di tiap tahunnya bahkan dalam waktu kurun satu tahun kerap terjadi dua kali bencana longsor. Dari data yang ada melihat kerugian yang dihasilkan menandakan bahwa bencana longsor ini merupakan bencana yang serius dan perlu untuk ditangani. Selanjutnya, dalam kurun tiga tahun diatas pada tahun 2019 korban yang terdampak bencana tanah longsor mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 61 jiwa.

Bencana alam pada dasarnya tidak dapat dihindari oleh manusia. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai rangkaian

peristiwa yang mengancam dan menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam dan atau tidak wajar serta faktor manusia yang menyebabkan terjadinya bencana, menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pada tahun 1987 oleh Anthony J. Taylor, membagi bencana ke dalam tiga kategori yaitu, pertama industrial disaster (bencana akibat industrialisasi) seperti bendungan runtuh, pembangunan limbah berbahaya, industri yang mengabaikan ekologis,dll. Kedua humanistic disaster (bencana akibat perbuatan manusia) seperti kerusakan ekologis, kecelakaan di jalan raya dan kereta. Dan ketiga natural disaster (bencana karena alam) seperti longsor, gempa, gunung meletus, dll.

Tanah longsor secara umum adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material laporan, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara geologi tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah (Nandi, 2007). Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan maupun dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. Longsor tidak hanya bisa terjadi di daratan saja, tetapi juga terjadi di bawah laut atau dapat disebut sebagai longsor bawah laut.

Di Kecamatan Tanah Merah longsor yang terjadi merupakan longsor bawah laut. Berdasarkan observasi awal peneliti mendapatkan informasi bahwa bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Tanah Merah merupakan akibat dari terjadinya proses abrasi. Dalam prosesnya terjadi tekanan arus laut yang kuat atas perputaran air dari pasang ke surut ataupun sebaliknya yang mengakibatkan pengikisan tanah secara berkelanjutan kemudian curah hujan yang tinggi juga menjadi bagian dari penyebab terjadinya proses abrasi karena dengan jenis tanah yang merupakan tanah rawa mengakibatkan tanah terlalu banyak menampung dan pengikisan dari bawah menyebabkan tanah menjadi labil, pada saat seperti itulah marak terjadinya longsor.

Pemerintah merupakan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelayanan publik dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada setiap orang yang terlibat dalam hubungan pemerintahan agar setiap anggota masyarakat yang bersangkutan dapat memperoleh pelayanan pada saat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan orang yang diurusnya. Berbicara tentang kewajiban ada banyak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah mulai dari melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak sampai ke menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

Pemerintah baik pusat maupun daerah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, dengan penekanan mulai dari pra bencana hingga ke rekonstruksi dan rehabilitasi yang merupakan bagian dari pascabencana. Hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana harus segera dipastikan sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mampu meminimalisir banyak korban akibat bencana. Pemulihan situasi dari dampak bencana mulai dari pengalokasian belanja dan anggaran nasional yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi harus menjadi jaminan bagi para korban.

Pemerintah daerah melalui BPBD merupakan pihak yang memegang tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bahwa Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok diantaranya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara di tingkat kabupaten.

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa diperlukannya

berbagai macam penanggulangan dan upaya guna meminimalisir bencana longsor maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok BPBD dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Indragiri Hilir



## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana alam.

3. Manfaat Metodologis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah Kemudian bisa dibandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Peran Pemerintah Daerah**

##### **2.1.1 Peran**

Peran berasal dari kata “peran” yang artinya merupakan bagian dari atau memiliki pimpinan utama. Peranan atau role juga diartikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peran merujuk pada kelompok yang kurang lebih berperilaku homogen, yang didefinisikan oleh norma dan diharapkan oleh warga dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi perannya atau ekspektasi lainnya.

Menurut Levinson (2002:200) yang dikutip dalam Soedjono (2002:200), peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sangat penting bagi struktur sosial masyarakat, termasuk peran yang berkembang sesuai dengan status atau status individu. status dalam masyarakat Norma, dalam pengertian ini, peran adalah serangkaian aturan yang memandu kehidupan sosial masyarakat. Peran artinya ketika seseorang memasuki komunitas dalam skala kecil (keluarga) dan skala besar (komunitas besar), setiap orang harus belajar memainkan peran

tertentu. Peran sosial yang perlu dikaji meliputi dua aspek, yaitu belajar memenuhi kewajiban dan menuntut hak dari peran tersebut, serta memiliki sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Merton dari Raton mengungkapkan bahwa peran diartikan sebagai cara berperilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang untuk mengambil posisi atau posisi tertentu (Raho, 2007:67). Oleh karena itu peran adalah keutuhan hubungan yang terbentuk akibat peran individu dalam status sosial masyarakat.

Scott dkk. Dalam Kanfer, dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

1. Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
2. Peran terkait dengan perilaku kinerja (task behavior), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
3. Peran sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity)
4. Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
5. Peran non-kerja (jobs) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987:197).

### **2.1.2 Pemerintah Daerah**

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur

kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk memelihara sistem ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal. Dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya permintaan, maka peran pemerintah pun berubah menjadi melayani masyarakat. Intinya, pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pemerintahan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi agar setiap anggota dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sendiri-sendiri untuk mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2011:13). Osborne dan Gaebler yang dikutip oleh Rasyid (2011:19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara.

Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggung jawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan negara, yang melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah sebagai

seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas dasar tertentu untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, tanggung jawab dan wewenang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan nasional secara keseluruhan yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan

mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isi pokok: Pertama, menyelesaikan penugasan dan kewenangan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuhkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan Laissez Faire, tetapi ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpin serta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah

sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas pokok pemerintah dari berbagai ahli:

#### 1. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

#### 2. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

#### 3. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

#### 4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

#### **2.1.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana**

Kapasitas pemerintah harus memadai untuk pengendalian situasi di daerah rawan bencana. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan dan persiapan tanggap bencana, koordinasi bantuan, kebijakan rekonstruksi, dan mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah yang telah menyusun rencana penanggulangan bencana dapat berkoordinasi dengan baik. Menurut hukum humaniter internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam.



Daerah bencana mencoba mengkaji serangkaian kebijakan, praktik dan profesionalisme dalam penanggulangan darurat dari perspektif pemerintah daerah. Upaya ini dipusatkan pada pemerintah daerah sebagai tahap pertama dari tahap bencana. Menanggapi sangat penting untuk meminimalkan korban dan mengoptimalkan daya tanggap masyarakat. Pekerjaan penanggulangan bencana regional bergantung pada pemerintah daerah.

Fokus masalah pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana semua terkonsentrasi pada pemerintah daerah. Ada beberapa alasannya, yaitu

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
3. Memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
4. Kebijakan tanggap bencana diterapkan secara lokal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

## 1. Tugas Pokok BPBD

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan para relawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Fungsi BPBD

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan

bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **2.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana**

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana mengacu pada rangkaian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau menghancurkan faktor alam atau tidak wajar atau faktor manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta ancaman dan kerusakan terhadap kehidupan masyarakat. dan mata pencaharian Pengaruh psikologis.

Menurut “Asian Disaster Reduction Center (2003)” bencana merupakan gangguan yang serius bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian yang meluas. Masyarakat yang terkena dampak, berbagai material dan lingkungan (alam) terasa di luar kemampuan manusia. Menurut ketentuan tentang penanggulangan bencana pada Pasal 1 (2), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain dalam bentuk Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

2. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian

tidak wajar atau rangkaian kejadian tidak wajar, antara lain kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, wabah penyakit, dan wabah penyakit.

3. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian atau rangkaian kejadian yang disebabkan oleh ulah manusia, termasuk konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.

Biasanya faktor penyebab bencana adalah interaksi antara ancaman dan kerentanan. Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ancaman bencana adalah peristiwa yang dapat menimbulkan bencana, sedangkan pada ayat (14), ciri-ciri kerentanan terhadap dampak atau risiko/kerentanan terhadap bencana adalah sifat biologis, hidrologi, iklim, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi dari suatu masyarakat tertentu di suatu kawasan. Kondisi atau karakteristik mengurangi jangka waktu di mana komunitas mencegah, mengurangi, mempersiapkan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi efek merugikan dari bahaya tertentu. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan tanggap bencana,

semakin besar pula peluang terjadinya bencana. Celah dan kapasitas/kapabilitas mirip dengan dua sisi mata uang. Mengurangi level kerentanan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas/fungsionalitas. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas akan mengurangi level kerentanan (fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan). Parahnya dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu terjadinya bencana (yaitu bencana yang tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan).

Menurut Benson dan Clay (2004) yang dikutip oleh Supriatna (2011), dampak bencana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu

1. Dampak langsung, antara lain kerugian finansial akibat rusaknya aset ekonomi, seperti kerusakan gedung dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian, dan bangunan lainnya.
2. Dampak tidak langsung, termasuk menghentikan proses produksi, kehilangan output dan sumber pendapatan.
3. Pengaruh sekunder atau pengaruh selanjutnya (pengaruh sekunder). Misalnya: pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi, rencana pembangunan yang telah dirumuskan terhenti, defisit neraca pembayaran bertambah, dan angka kemiskinan meningkat.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam penanggulangan

bencana. Tanggung jawab pemerintah meliputi:

1. Pengurangan risiko bencana dan integrasi pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
2. Melindungi masyarakat dari bencana
3. Memastikan keadilan dan mencapai standar pelayanan minimum untuk hak-hak masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi
4. Pemulihan dari dampak bencana
5. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
6. Mengalokasikan Dana Anggaran Penanggulangan Bencana (DSP)
7. Dan dalam bentuk siap pakai) Menjaga arsip/dokumen dampak dan ancaman bencana yang benar dan dapat dipercaya.

Adapun mengenai Pasal 7 ayat (1) menjelaskan kewenangannya, antara lain:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional.
2. Penyusunan rencana pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Penetapan bencana nasional.
4. Merumuskan kebijakan kerjasama dan penanggulangan

bencana dengan negara lain, lembaga atau pihak internasional lainnya.

5. Merumuskan kebijakan penggunaan teknologi yang berpotensi menjadi ancaman atau sumber bahaya.
6. Merumuskan Kebijakan untuk mencegah pengendalian dan pengurangan sumber daya alam di luar kemampuan pemulihan alam.
7. Dan mengontrol pengumpulan dan distribusi mata uang atau barang secara nasional.

Menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap prabencana melalui pengelolaan risiko bencana, dan pengelolaan pemulihan bencana melalui pengelolaan darurat dan kegiatan di posko. Fase pemulihan bencana untuk diimplementasikan. Ketiga fase tersebut merupakan empat fase (pencegahan dan mitigasi, persiapan, tanggap darurat dan pemulihan) dari siklus penanggulangan bencana yang selama ini kita kenal.

Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan kebencanaan di Indonesia, termasuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan rencana penanggulangan bencana. Secara garis besar, kebijakan

penanggulangan bencana nasional adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Di tingkat pusat, pemerintah telah membentuk badan yang tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana, yaitu BNPB. BNPB merupakan lembaga non kementerian yang tugas pokoknya menangani bencana di tingkat nasional, sedangkan pelaksanaannya oleh BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga



Berencana.

### 2.3 Kerangka Konsep

1. UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



**FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI  
PELAKSANAAN TUGAS POKOK  
BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR:**

**a. Faktor Pendukung**

1. Tersedianya Regulasi Tentang Bencana Alam
2. Tersedianya Dana Siap Pakai dan Dana Tak Terduga
3. Selalu Tersedianya Transportasi Jalur Laut

**b. Faktor Penghambat**

1. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan
2. Tidak Ada Tanah Milik Pemerintah

**TUGAS POKOK BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR:**

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup:

**a. Pencegahan bencana**

1. Sosialisasi Pencegahan Bencana Berbasis Masyarakat
2. Pembangunan Konstruksi Pondasi Turap

**b. Penanganan darurat dan logistik**

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban

**c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

1. Rekonstruksi Jembatan
2. Pembangunan Rumah Layak Huni